KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tak Ada Kelompok Yang Pengaruhi Keputusan KPK
Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 8

Tak Ada Kelompok Yang Pengaruhi Keputusan KPK

[JAKARTA] Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, tidak ada kelompok di internal lembaganya yang bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan pimpinan KPK. Selama ini, keputusan pimpinan diambil secara kolektif, kolegial, dan independen.

Penegasan tersebut disampaikan Agus menanggapi pengakuan Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman kepada Pansus Angket KPK, mengenai penyidik senior Novel Baswedan sebagai sosok yang *powerful* dan dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil pimpinan KPK.

"Kelompok yang mempengaruhi kebijakan, saya pastikan tidak ada. Jadi kami pimpinan dalam mengambil keputusan secara kolektif kolegial dan independen," tegas Agus, Rabu (30/8).

Agus juga menanggapi pernyataan terbuka Aris Budiman kepada Pansus mengenai adanya friksi di internal KPK. Menurutnya, friksi adalah hal yang lazim di lingkungan kerja. "Di mana tempat bekerja tak ada friksi? Bekerja di mana pun anda, (friksi pasti) ada. Kalau saya yang namanya friksi wajar saja," katanya.

Dia mengungkapkan, pimpinan KPK sebenarnya berupaya mencegah Aris menghadiri panggilan Pansus Angket. Hal itu lantaran sikap KPK masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan Pansus.

Agus menuturkan, Aris mendapat undangan secara langsung dari Pansus Angket KPK, selaku Direktur Penyidikan KPK. "Datang surat undangan. Surat undangan itu bukan untuk pimpinan KPK, tapi ke yang bersangkutan langsung," ungkapnya.

Dia mengaku pimpinan KPK baru mengetahui undangan itu pada Selasa (29/8) sore, atau hanya beberapa jam sebelum rapat Pansus digelar. Agus bersama sejumlah pimpinan KPK yang sedang berada di kantor membahas soal undangan tersebut. Namun, saat pihaknya memanggil, mantan Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri itu ternyata sudah berangkat ke Gedung DPR. "Kami memanggil yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat," tuturnya.

Aris pun menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar Pansus Angket KPK tanpa izin atau berkonsultasi lebih dulu dengan pimpinan KPK. Di hadapan Pansus, Aris mengaku telah melanggar perintah pimpinan KPK. Aris mengklaim selama 29 tahun bertugas baru kali ini membantah atasannya. "Itu kenyataan yang kita dengarkan dari (rapat) dengar pendapat itu," kata Agus.

Di hadapan Pansus Angket, Aris membeberkan adanya friksi di internal KPK. Salah satu friksi yang menerpanya terkait dengan rencana penambahan penyidik di KPK.

Secara terbuka Aris mengungkapkan, penyidik senior KPK, Novel Baswedan sebagai sosok yang *powerful* di KPK, dan dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil pimpinan KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan juga turut menanggapi pernyataan Aris Budiman di depan Pansus. Menurut Basaria, friksi dalam suatu organisasi kerja merupakan hal wajar.

Basaria menegaskan, sejauh ini suasana di internal KPK masih terbilang sehat, meskipun kerap ada perbedaan pendapat dari masing-masing pegawai KPK.

"Sementara ini menurut saya masih sehat, terlepas sedikit dari sekian ribu orang tidak mungkin punya pemikiran sama, pasti berbeda-beda. Jadi *enggak* seperti bebek," ujarnya. Friksi yang dibeberkan Aris tersebut, dikhawatirkan menjadi amunisi baru bagi Pansus KPK untuk menyudutkan KPK. Bahkan, bukan tidak mungkin keterangan-keterangan yang diungkapkan Aris menjadi modal Pansus untuk mendorong revisi UU KPK yang semakin santer belakangan ini, yang bermuara pada upaya melucuti kewenangan lembaga antikorupsi itu.

Nasib Aris

Pada kesempatan tersebut, Agus Rahardjo mengungkapkan, pihaknya segera menentukan sikap terkait langkah Aris Budiman menghadiri RDP Pansus Angket pada Selasa (29/8) malam.

Keputusan akan diputuskan setelah pimpinan KPK menerima rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK yang menggelar sidang atas tindakan Aris. DPP KPK terdiri dari pejabat eselon I, meliputi Sekjen dan para deputi, ditambah Biro Hukum dan Pengawasan Internal KPK. Agus mengingatkan, KPK memiliki aturan internal yang sangat ketat terkait kepegawaian. Segala bentuk pelanggaran memiliki konsekuensi. "Hasilnya belum dilaporkan kepada kami. Pasti kami mengikuti bagaimana rekomendasinya. Kalau memang diperlukan pemeriksaan berikutnya ter-

hadap yang bersangkutan (Aris Budiman), kami juga akan memperkuat PI (pengawasan internal) juga agar pekerjaan jauh lebih cepat dari yang lalu-lalu," katanya.

Dari rekomendasi DPP dan pemeriksaan pengawas internal, pimpinan KPK akan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan Aris serta sanksi yang dijatuhkan.

Digelarnya sidang DPP mengindikasikan tindakan Aris tidak sesuai dengan prosedur. Sebab, lanjut Agus, DPP dibentuk dan bersidang jika ada pegawai atau pejabat struktural yang ditengarai bertindak di luar prosedur yang berlaku. Meski demikian, selama proses persidangan dan pemeriksaan ini, Aris tetap menjabat sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik). Dengan demikian, penyidikan perkara yang dilakukan KPK masih menjadi wewenangnya.

Agus memastikan, kewenangan Aris sebagai Dirdik sangat terbatas. Sebab, Dirdik merupakan bawahan dari Deputi Penindakan dan pimpinan KPK.

Proses Internal

Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan, lembaganya tak khawatir dengan serangan-serangan yang akan dilancarkan Pansus, menyusul pengakuan Aris Budiman. "Saya kira Pansus sudah bekerja cukup lama, dan kami tidak terlalu mengomentari apa yang dikerjakan Pansus tersebut. KPK itu banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Kami lakukan operasi tangkap tangan kalau ada tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Jadi energinya kita fokuskan di sana," katanya.

Menurut Febri, kalaupun ada isu-isu lain di luar proses penanganan perkara, pihaknya berupaya menjaga integritas lembaga KPK dengan melakukan proses pemeriksaan internal. Selain hadir di RDP Pansus Angket tanpa izin pimpinan KPK, nama Aris Budiman juga disebut dalam persidangan perkara dugaan pemberian keterangan palsu dengan terdakwa mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani. Aris disebut sebagai salah satu dari tujuh pegawai KPK yang bertemu dan menyampaikan informasi mengenai jadwal pemeriksaan Miryam kepada anggota Komisi III DPR. "Kalau ada hal-hal termasuk informasi-informasi di persidangan Miryam, kepentingan KPK menjaga integritas lembaga ini melalui pemeriksaan internal yang nanti bisa dipertanggungjawabkan hasilnya," katanya. Febri menegaskan, proses pemeriksaan terhadap Aris saat ini masih berjalan. Pihaknya akan memperhatikan dan mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi terkait kehadiran Aris di RDP Pansus. [F-5]



ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan Wali Kota Tegal di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/8). KPK menetapkan tiga tersangka pada OTT di Tegal, Jakarta dan Balikpapan dalam kasus suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017 yakni Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Ketua DPD Partai NasDem kabupaten Brebes Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur Keuangan RSUD Kardinah Tegal Cahyo Supardi serta mengamankan uang sebesar Rp200 juta dan rekening bank senilai Rp100 juta.